

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya pembangunan, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi salah satu fokus pembahasan utama di tengah masyarakat global. Terbukti dengan semakin meningkatnya upaya advokasi isu terkait oleh berbagai lembaga internasional dan pemerintahan negara. Salah satunya Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs) menyatakan bahwa partisipasi yang setara antara perempuan dengan laki-laki dalam pemerintahan, kekuasaan dan pengambilan keputusan merupakan bagian dari hak fundamental dan indeks pembangunan (United Nations [UN], 2019). Pada level nasional visi meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 melalui strategi dan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) mendorong peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja, serta politik, jabatan publik, dan pengambilan keputusan (Bappenas, 2020).

Pada bidang politik setidaknya dalam 20 tahun terakhir banyak negara demokrasi telah mengadopsi mekanisme dan kebijakan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. Pada tahun 1995 hanya empat negara yang menerapkan kuota gender, hingga dua dekade kemudian tercatat 120 negara telah mengadopsi beberapa bentuk mekanisme kuota gender untuk meningkatkan keterwakilan perempuan (IPU, 2015). Meski dukungan kuota gender dapat dibilang diadopsi merata secara internasional namun faktanya rasio perwakilan perempuan yang terpilih masih rendah ketimbang laki-laki. Terhitung pada Oktober 2019, secara global perwakilan perempuan dalam parlemen masih dalam jumlah yang belum signifikan, yaitu sebesar 24% di majelis rendah (*Lower House*) dan 24% di majelis tinggi (*Upper house/ Senat*) pada negara-negara demokrasi bikameral (IPU,

2019).

Dengan asumsi kecepatan perkembangan saat ini, diperkirakan butuh 40 tahun untuk mencapai jumlah perwakilan yang setara antara perempuan dan laki-laki di parlemen secara global (United Nations [UN], 2022). Tidak berbeda dengan kondisi global, pada pemilihan umum di Indonesia, kandidat legislatif perempuan yang terpilih mengalami penurunan dari 18,2% pada tahun 2009 menjadi 16,8% pada tahun 2014. Padahal pada tahun yang sama terjadi rekor pencalonan kandidat perempuan sebanyak 37,3%. Terdapat indikasi bahwa *open-list electoral system* atau sistem proporsional daftar terbuka mendorong lemahnya perolehan suara kandidat perempuan dimana suara secara tidak proporsional mengarah kepada kandidat laki-laki (IPU, 2015).

Politik sendiri secara umum diasosiasikan dengan maskulinitas, karenanya masyarakat mendefinisikan peran politik masuk ke dalam istilah maskulin serta lebih memilih kandidat dengan sifat stereotip laki-laki (Schneider & Bos, 2019). Schneider & Bos (2013) mengemukakan bahwa politisi perempuan merupakan sub tipe dari kelompok perempuan secara umum, dimana stereotip yang melekat pada politisi perempuan berbeda dengan apa yang disematkan pada perempuan lainnya, sementara politisi laki-laki diidentifikasi dengan sifat maskulin sebagaimana yang disematkan pada laki-laki secara umum. Selain itu Dolan & Lynch (2016) menemukan bahwa derajat pandangan stereotipik atas politisi perempuan cenderung meningkat seiring tingginya tingkat jabatan politik yang diperebutkan. Perempuan yang mengincar jabatan eksekutif seperti gubernur dan presiden tidak akan mendapat tingkat toleransi yang sama dengan perempuan yang mengincar jabatan legislatif.

Distribusi peran sosial laki-laki dan perempuan yang kontras serta kesimpulan yang timbul mengenai seperti apa laki-laki dan perempuan, memunculkan konsepsi stereotip gender (Koenig & Eagly, 2014). Stereotip gender (juga disebut stereotip seks, stereotip peran seks, atau stereotip peran gender) mengacu pada kumpulan keyakinan terstruktur tentang atribut

pribadi, misalnya, minat, kompetensi, dan peran, perempuan dan laki-laki (Ashmore & Del Boca, 1979). Stereotip gender menempatkan laki-laki sebagai kelompok yang lebih agentik (misalnya, kompeten, ambisius, asertif, dan kompetitif) dan perempuan sebagai kelompok yang lebih komunal (misalnya, mendukung, peduli, hangat, dan emosional) (Rudman, Moss-Racusin, Glick & Phelan, 2012).

Penelitian mengenai stereotip gender semakin berkembang dalam beberapa dekade terakhir, pada situs link.springer.com (diakses pada 26 Desember 2022) pencarian dengan kata kunci “gender stereotype” menunjukkan 13.846 artikel. Berbagai alat ukur berkaitan dengan stereotip gender telah dipublikasi oleh para peneliti. Salah satu yang populer adalah *Personal Attributes Questionnaire* (PAQ; Spence dkk. 1981). PAQ didasarkan pada konseptualisasi agensi dan komunal sebagai karakteristik individual. Selain itu beberapa lainnya diantaranya *Bem Sex-Role Inventory* (BSRI; Bem, 1974), *The Attitudes Toward Scale* (Spence & Heilmreich, 1973), *The Gender Role Stereotype Scale* (Mills, Culbertson, Huffman & Connel, 2012), dan *Traditional Masculinity-Femininity (TMF) scale* (Kachel, Steffens & Niedlich, 2016).

Selain beberapa alat ukur yang telah umum dikenal sebelumnya. Beberapa tahun belakangan terdapat tren eksplorasi alat ukur stereotip gender dalam konteks kelompok sosial dan bidang yang spesifik. Seperti *Teacher Gender Stereotype Scale Toward Mathematic* (Nurlu, 2017) yang mengukur pandangan stereotipik guru mengenai kemampuan matematik siswa berdasarkan gender, *Female Gamer Stereotype Scale* (FGSS) (Yao, S, Elithorpe, M, Ewoldsen, D, 2022) mengukur keyakinan stereotipik terhadap perempuan yang bermain video game, *Gender-based food intake stereotype scale* (GBFISS) (Monge-Rojas, dkk. 2020) mengukur stereotip pola konsumsi makanan berdasarkan gender. Beberapa alat ukur tersebut menunjukkan bahwa pengembangan alat ukur stereotip gender pada konteks bidang tertentu mungkin untuk dilakukan.

Pada ranah politik, sejauh pengetahuan peneliti belum ada instrumen

alat ukur stereotip gender yang valid dan reliabel serta telah digunakan secara berulang pada beragam penelitian. Mengingat kebanyakan penelitian perihal stereotip gender dalam politik dilakukan dengan mengadopsi metode eksperimen (contoh: Devroe, R. & Wauters, B., 2017; Blackman, A. D., & Jackson, M., 2019; Bauer, N. M., 2015, 2020; Sweet-Cushman, J., 2021). Meski upaya pengukuran stereotip gender dalam politik telah dilakukan namun belum ada penelitian yang mengintegrasikan konteks tertentu yang mungkin terjadi dalam politik elektoral. Pengukuran variabel terkait saat ini masih berfokus pada eksplorasi sifat-sifat stereotipik pada politisi (Schneider & Bos, 2013; Turska-Kawa & Olszanecka-Marmola 2018).

Di Indonesia studi pengembangan alat ukur psikologi secara umum masih terhambat mengingat minimnya upaya yang dilakukan dalam mengembangkan alat ukur tersebut (Suwartono, 2016). Karenanya pada penelitian ini peneliti tertarik untuk melakukan studi pengembangan alat ukur, dalam hal ini skala stereotip gender pada politik. Pengembangan skala stereotip gender dalam politik ini didasari fakta bahwa masih rendahnya studi pengembangan alat ukur psikologi di Indonesia, lebih khusus belum adanya pengembangan instrumen yang mengukur konstruk stereotip gender pada konteks politik Indonesia.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berikut merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Apa saja tema yang ditemukan atas konstruk stereotip gender dalam politik?
2. Bagaimana model yang dihasilkan alat ukur stereotip gender dalam politik?
3. Bagaimana hasil uji validitas konvergen, diskriminan, dan bias *social desirability* alat ukur stereotip gender dalam politik?
4. Bagaimana hasil uji reliabilitas alat ukur stereotip gender dalam politik?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Mengetahui informasi properti psikometri dari alat ukur stereotip gender dalam politik.
2. Menghasilkan alat ukur yang valid dan reliabel untuk digunakan dalam penelitian dengan konstruk stereotip gender dalam politik.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan informasi dan referensi mengenai alat ukur stereotip gender dalam konteks politik elektoral. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara umum dalam pengembangan ilmu politik dan ilmu psikologi secara khusus pada bidang psikometri.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan alat tes yang dapat dipercaya bagi para mahasiswa, peneliti lain dalam melakukan penelitian terkait gender dan politik, bagi partai politik dalam penyusunan strategi politik, lembaga survey, serta bagi pemerintah terkait perumusan kebijakan untuk mengadvokasi inklusivitas gender dalam politik.

E. Struktur Organisasi Skripsi

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan pemaparan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, serta struktur organisasi skripsi.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisikan pemaparan mengenai landasan teoritis yang digunakan dalam penelitian

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan pemaparan secara rinci mengenai metode

penelitian yang mencakup desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, definisi operasional, teknik pengumpulan data, prosedur penelitian, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

4. BAB IV HASIL & PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil pengolahan dan analisis data disertai dengan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan.

5. BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Bab ini memaparkan kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian, implikasi, serta rekomendasi dari hasil penelitian untuk penelitian selanjutnya.